

BAB II

SENGKETA DAGANG ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN

2.1 Hubungan Kerja Sama Jepang Dan Korea Selatan

Hubungan antara Jepang dan Korea terjadi sejak masa penjajahan Jepang atas Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Selama periode penjajahan tersebut, Jepang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Korea dengan mengambil sumber daya yang dimiliki Korea dan melakukan penindasan budaya. Pada tahun 1910, secara resmi koloni Jepang menjadikan Semenanjung Korea sebagai bagian dari mereka. Jepang datang ke Korea dengan membawa prinsip Naeseon Ilche yang berarti satu kesatuan¹. Prinsip yang dibawah Jepang ini digunakan untuk menipu rakyat Korea dengan cara mengambil hati rakyat Korea yang pada akhirnya akan menjadikan Semenanjung Korea untuk mencapai tujuan nasional Jepang.

Pemerintah Jepang yang berada di Semenanjung Korea telah didominasi oleh militer Jepang. Mereka disana merampas banyak hak yang dimiliki oleh warga sipil Korea. Pemerintahan Jepang melakukan eksploitasi dengan mengambil sumber daya alam milik Korea untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Pada tahun 1931, Jepang membangun *Comfort Station* yang merupakan tempat dimana wanita Korea direkrut oleh Jepang dan dijadikan sebagai *Comfort Women* untuk

¹ Annisa Nur Islamiyah, 2020, *Nafila Maulina Priyanto and Ni Putu Dyana Prabhandari, Diplomasi Budaya Jepang Dan Korea Selatan Di Indonesia Tahun 2020: Studi Komparasi*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Hal 4.

dipekerjakan sebagai wanita penghibur selama Perang Dunia II². Ketika Jepang menyerah pada sekutu saat Perang Dunia II tahun 1945, pada saat itu Korea mendapatkan kemerdekaannya. Akan tetapi, Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan yang kapitalis dan Korea Utara yang komunis. Meskipun demikian, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan tetap terpengaruh oleh masalah sejarah³.

Hubungan kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan terbentuk setelah adanya perjanjian antara kedua negara tersebut pada tahun 1965, yaitu *Treaty on Basic Relation Between Japan and South Korea* yang isinya adalah menormalkan hubungan dan kerja sama ekonomi antara kedua negara⁴. Akan tetapi perjanjian tersebut faktanya tidak dapat menyelesaikan masalah sejarah antara kedua negara. Dalam perjanjian tersebut tidak membahas kerugian yang didapatkan oleh warga Korea Selatan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan Jepang ketika Perang Dunia II. Pada saat itu Jepang membayar \$800 juta kepada Korea Selatan sebagai bagian dari persetujuan mengenai kerja sama ekonomi antar kedua negara, namun hal tersebut bukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahan Jepang di

² Adityani, Dwi F. *Memori Dan Trauma Dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" Terhadap Kerjasama Keamanan Jepang Dan Korea*, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 1, (2018), Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/21/3/2024.19.50>.

³ Salma Adilla Hanifa, 2020, *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Sengketa Dagang Bahan-Bahan Semi Konduktor Jepang Ke Korea Selatan Tahun 2019*, Skripsi, Purwokerto: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jendral Soedirman, hal. 2.

⁴ Irvina Nurina, 2022, *Upaya Korea Selatan Mempererat Hubungan Bilateral Dengan Jepang Periode 2010-2019*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 1-2.

masa lalu⁵. Sehingga permasalahan tersebut menjadikan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan tidak berjalan lancar.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan terus mengalami hambatan akibat kedua negara masih memiliki rasa sentimental yang disebabkan masalah sejarah yang cenderung mengalami perubahan siklus naik dan turun seiring dengan waktu. Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang masih menyulut emosi bagi warga Korea Selatan atas perlakuan yang pernah dilakukan Jepang selama Perang Dunia II. Isu *Comfort Women* merupakan salah satu permasalahan yang melibatkan wanita Korea Selatan yang diperdagangkan ke dalam perbudakan seksual oleh militer Jepang selama masa Perang Dunia II. Pada tahun 1990 isu *Comfort Women* mulai mendapat perhatian kembali dari rakyat Korea Selatan, karena Komite Penasehat Anggaran di Jepang menyatakan bahwa Jepang tidak mengakui akan keterlibatan mereka terhadap isu *Comfort Women* di masa lalu dan menolak untuk bertanggung jawab⁶. Pernyataan tersebut menyebabkan kemarahan bagi warga Korea Selatan yang menuntut pengakuan, keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami selama masa kependudukan Jepang. Isu *Comfort Women* menjadi lebih dikenal secara Internasional pada tahun 2000-an melalui perhatian media yang lebih besar. Isu *Comfort Women* sering kali dimanfaatkan dalam konteks hubungan kerja sama antara kedua negara.

⁵ Laudia Ayu Eka Putri, Dinda. *Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement On Comfort Women*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional 7, No. 3 (2018). Diakses dari: [Http://Journal.Unair.Ac.Id/Download-Fullpapers-Jahi932e2d1](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi932e2d1) (22/3/24.20.00 WIB) .

⁶ Dr. Diah Kusumaningrum Nandita Putri K, *Deficient Reconciliation: The Cause of Lasting Socio-Political Tension between South Korea and Japan*, 2022, Jurnal Hubungan Internasional NO 18/429316/SP/28541, Diakses dari: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/213385> (23/3/2024.20.46 WIB).

Puncak permasalahan isu *Comfort Women* terjadi pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, Jepang dan Korea Selatan mencapai kesepakatan yang kontroversial terkait isu *Comfort Women*. Kesepakatan tersebut melibatkan pengakuan resmi dan permintaan maaf yang tulus dari pemerintah Jepang atas peranannya dalam masalah *Comfort Women* selama Perang Dunia II⁷. Pemerintah Jepang berkomitmen untuk menyediakan dana kompensasi bagi korban selama masa penjajahan Jepang yang masih hidup. Namun, kesepakatan tersebut menuai kritik keras dari beberapa korban *Comfort Women* dan masyarakat Korea Selatan yang merasa bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dalam memenuhi keadilan bagi para korban. Reaksi negatif ini menciptakan ketegangan dalam hubungan antara Jepang dan Korea Selatan dan menimbulkan perdebatan yang panjang antara kedua negara tentang bagaimana isu *Comfort Women* harus diatasi secara tepat. Keterlibatan sejarah ini mempengaruhi hubungan kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan terhadap Jepang. Isu *Comfort Women* telah mempengaruhi kerja sama ekonomi, diplomasi, dan hubungan bilateral kedua negara dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan mereka⁸.

Selain masalah *Comfort Women*, Jepang dan Korea Selatan memiliki permasalahan sengketa yang mempengaruhi hubungan kerja sama antara kedua negara. Sengketa atas Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan telah

⁷ Andre, I Putu, Dharma Putra, 2019, *Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas Yang Dicabut Jepang*, Jurnal Hubungan Internasional, VOL 1 NO 1 (2022), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/68>.

⁸ Maura, Z. S. (2022). *Dukungan Jepang Terhadap Un Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Perempuan Pada Saat Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh, VOL 3, NO 2 (2022), <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/3321>.

berlangsung lama. Dokdo dalam bahasa Jepang disebut Takeshima karena merupakan kepulauan kecil yang terletak di Laut Timur antara Korea Selatan dan Jepang. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, kendali atas Korea Selatan termasuk Pulau Dokdo berpindah ke tangan Sekutu. Namun, wilayah ini tidak sepenuhnya diatur dan menjadi subjek klaim oleh kedua negara. Baik Korea Selatan maupun Jepang memiliki klaim sejarah yang panjang atas Pulau Dokdo. Korea Selatan mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut telah menjadi bagian dari wilayah Korea sejak zaman dulu dan pulau tersebut telah dihuni oleh warga Korea sebelum kedatangan Jepang. Di sisi lain, Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan klaim sejarah. Pada tahun 1970 hingga 1990-an, sengketa Dokdo semakin membuat hubungan antara kedua negara renggang, kedua negara mencoba untuk klaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut serta sumber daya alam di sekitarnya⁹. Klaim atas Dokdo pada tahun 2000-an semakin memanas antara Jepang dan Korea Selatan. Jepang mengklaim atas Pulau Dokdo sehingga menyebabkan reaksi keras dari Korea Selatan. Klaim ulang ini menimbulkan kekhawatiran di Korea Selatan dan meningkatkan ketegangan hubungan antara kedua negara.

Puncak sengketa atas Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang terjadi pada tahun 2012 pada bulan Agustus ketika Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo. Kunjungan ini memicu protes keras dari pemerintah Jepang dan menciptakan ketegangan yang signifikan antara kedua

⁹ Utami Gita Syafitri, *Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan*, *Sumatra Journal of International Law* (2013), <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53496652/pdf-libre.pdf>

negara. Kunjungan Presiden Lee Myung-bak ke Pulau Dokdo pada tanggal 10 Agustus 2012 adalah yang pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan mengunjungi pulau tersebut selama masa jabatan. Tindakan tersebut dianggap sebagai upaya provokatif oleh pemerintah Jepang karena Pulau Dokdo menjadi salah satu poin sengketa utama antara kedua negara. Pemerintah Jepang mengecam kunjungan tersebut sebagai tindakan yang tidak bisa diterima dan mengeluarkan protes resmi kepada Korea Selatan. Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Yoshihiko Noda menyatakan bahwa kunjungan tersebut tidak dapat ditoleransi dan akan merusak hubungan Jepang dengan Korea Selatan. Hal ini menciptakan dinamika yang rumit dalam hubungan bilateral kedua negara dan menjadi salah satu momen puncak dalam sengketa pulau tersebut pada tahun tersebut.

Hubungan kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan telah mencakup berbagai bidang selama bertahun-tahun dan dipengaruhi oleh sejarah yang kompleks sehingga menyebabkan ketegangan antara kedua negara. Meskipun terjadi perselisihan politik dan sejarah yang cukup rumit, Jepang dan Korea Selatan telah menjadi mitra perdagangan satu sama lain. Jepang dan Korea Selatan memiliki ekonomi yang saling melengkapi, Jepang menjadi salah satu produsen terbesar teknologi dan manufaktur di dunia, sementara Korea Selatan dikenal dengan industri teknologi informasi, mobil, dan elektronik yang maju¹⁰.

Ketergantungan saling terhadap impor dan ekspor antara kedua negara ini telah menjadikan hubungan perdagangan mereka sangat penting bagi kedua pihak.

¹⁰ Dafi Hifzillah, 2014, *Peran Hallyu Bagi Korea Selatan Dalam Hubungan Bilateral Korea Selatan - Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal 53.

Meskipun demikian, hubungan ini juga telah terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan sejarah, seperti perselisihan atas sejarah kolonial, klaim teritorial, dan masalah politik lainnya. Konflik politik ini mempengaruhi perdagangan dan investasi antara keduanya, meskipun kedua negara berusaha untuk memisahkan masalah politik dari hubungan ekonomi mereka.

Hubungan kerja sama kedua negara terus mengalami beberapa tantangan. Isu *Comfort Women* merupakan isu sensitif antara Jepang dan Korea Selatan akibat korban-korban *Comfort Women* mulai bersuara dan menuntut pengakuan, keadilan, dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami selama masa pendudukan Jepang. Jepang dan Korea Selatan memiliki kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara dalam bidang teknologi, namun sengketa terkait Pulau Dokdo dan isu *Comfort Women* tetap menjadi isu sensitif antara kedua negara. Jepang merespon adanya isu *Comfort Women* pada tahun 2016 melalui 2015 *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Kesepakatan tersebut dirancang untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* secara resmi antara kedua negara¹¹. Pada 2016 pemerintah Jepang memberikan 1 milyar yen kepada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan. Meskipun kesepakatan tersebut mendapat dukungan resmi dari pemerintah Korea Selatan, banyak kelompok dan sebagian besar dari korban *Comfort Women* dan keluarga mereka mengecam kesepakatan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak memadai dan tidak memenuhi keadilan bagi para korban.

¹¹ Adeana, D. (2019). *Respon Penolakan Solidaritas Comfort Women Korea Selatan Terhadap Agreement on Comfort Women Tahun 2015*. *Journal Hubungan Internasional* 1–117. Diakses dari: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8916/12/17>. (19/3/2024.20.31).

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan putusan bahwa perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi terhadap wanita Korea Selatan yang menjadi korban *Comfort Women* pada masa penjajahan Jepang. Pada awal tahun 2019, pemerintah Jepang meminta untuk melakukan konsultasi diplomatik dengan pemerintah Korea Selatan. Permintaan konsultasi ini terjadi sebagai respons terhadap peningkatan ketegangan antara kedua negara. Akan tetapi, tidak ada tanggapan dari pemerintah Korea Selatan. Kemudian pemerintah Jepang pada bulan Mei 2019 menyampaikan informasi kepada Korea Selatan agar kedua negara menunjuk dewan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara. Akan tetapi pemerintah Korea Selatan tidak segera memenuhi kewajibannya tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai dewan arbitrase¹². Tindakan pemerintah Korea Selatan tidak memenuhi kewajibannya untuk menunjuk pihak ketiga sebagai dewan arbitrase akan dianggap sebagai kelalaian atau penundaan dalam penyelesaian sengketa antara kedua negara. Dengan tidak adanya dewan arbitrase yang dibentuk, Jepang tidak memiliki forum resmi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Permasalahan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan mencapai puncaknya pada 1 Juli 2019 dengan eskalasi ketegangan yang signifikan. Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang terhadap Korea Selatan pada saat itu berada dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Shinzo Abe merupakan seorang politisi Jepang yang lahir pada tanggal 21 September 1954 di

¹² Dyansa, C. S. 2018. *Kebijakan Jepang Dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women Dengan Korea Selatan Pada Tahun 2015*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tokyo, Jepang. Shinzo Abe berasal dari keluarga politik yang berpengaruh di Jepang. Pengalaman politik Shinzo Abe berasal dari kakek dan ayahnya, sehingga mempengaruhi Shinzo Abe untuk membentuk minatnya dalam urusan politik sejak usia dini¹³.

Shinzo Abe memulai karir politiknya tahun 1982 dan bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Jepang¹⁴. Shinzo Abe terlibat dalam berbagai aspek diplomasi Jepang, mulai dari negosiasi perdamaian hingga kesepakatan perdagangan. Pengalaman tersebut memberinya wawasan yang berharga tentang cara negara-negara berinteraksi satu sama lain serta kepentingan yang terlibat dalam hubungan internasional¹⁵. Pada tahun 2012 Shinzo Abe terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang. Shinzo Abe memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi, keamanan, dan politik. Kemenangan Shinzo Abe dalam pemilihan Perdana Menteri tidak hanya mengamankan posisinya dalam partai, tetapi juga memberinya legitimasi untuk melanjutkan agenda-agenda politiknya¹⁶. Shinzo Abe dikenal karena pandangannya yang konservatif dalam politik dan ekonomi, serta keinginannya untuk menghidupkan kembali kekuatan Jepang di tingkat Internasional. Shinzo Abe menekankan pentingnya kedaulatan Jepang dalam isu-isu seperti persengketaan wilayah dengan dengan Korea Selatan.

¹³ Maiko Ichihara, “*Japanese Democracy after Shinzo Abe*”, (2021), Diakses dari: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jnlodmcy32&div=10&id=&page=18//2024.10.30 WIB>.

¹⁴ Dr. Asuka Matsumoto, “*The United States and Japan in Global Context: 2017*” (2017), Diakses dari: <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/66676/Yearbook-2017.pdf?sequence=9#page=39> (18/4/2024.22.35 WIB).

¹⁵ William Winberg, *Japan’s Remilitarization: Assessing Prime Minister Shinzo Abe’s Foreign Policy Legacy through the Surrounding Academic Debate*, (2020), Diakses dari: <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1539845&dswid=-7161> (19/4/2024.13.00 WIB).

¹⁶ Rika Scort Nort, *Hope Found in Lives Lost: Karoshi and the Pursuit of Worker Rights in Japan*, Contemporary Japan, VOL 28 (2016), Diakses dari: <https://doi.org/10.1515/cj-2016-0004>, (24/4/2024.15.30 WIB).

Shinzo Abe aktif dalam memperkuat hubungan Jepang dengan negara-negara lain¹⁷. Namun, kepemimpinan Shinzo Abe tidak terlepas dari kontroversi. Kritik terhadap kebijakan-kebijakannya terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan keamanan telah muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2019 memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan ekspor tiga bahan kimia yang digunakan dalam produksi teknologi ke Korea Selatan. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional. Fluktuasi dalam hubungan dagang antara Jepang dan Korea Selatan dipicu oleh berbagai faktor yang meningkatkan ketegangan politik di antara kedua negara. Fluktuasi hubungan dagang merupakan perubahan tidak teratur antar dua negara dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam volume perdagangan ataupun dinamika kebijakan perdagangan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Fluktuasi hubungan dagang terjadi karena adanya faktor, seperti perubahan dalam permintaan dan penawaran global, kebijakan perdagangan, faktor politik, dan faktor lain yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkup hubungan dagang.

Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang yang digunakan dalam produksi industri teknologi Korea Selatan tersebut menciptakan fluktuasi dalam hubungan perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan, terutama dalam sektor industri teknologi. Fluktuasi ini dapat dilihat dari penurunan ekspor bahan kimia

¹⁷ Aris Munandar Faisal Respatiadi, Muzani Jalaluddin, *Strategy for Overcoming Population Growth Problems in Japan*, Journal Of Religious and Social Scientific, VOL 18 NO 3, (2024), Diakses dari: <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3498>. (23/4/2024.12.00 WIB).

oleh Jepang terhadap Korea Selatan untuk sektor industri teknologi¹⁸. Sengketa dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan tahun 2019 memiliki dampak yang signifikan, karena bahan kimia dari Jepang merupakan bahan yang sangat penting dalam produksi industri teknologi bagi Korea Selatan. Ketergantungan Korea Selatan terhadap Jepang yang tinggi dalam rantai pasokan teknologi menciptakan fluktuasi yang dapat mempengaruhi daya saing dan produktivitas industri teknologi Korea Selatan. Dengan adanya fluktuasi hubungan perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan dapat mempengaruhi ketergantungan ekonomi dari kedua negara tersebut.

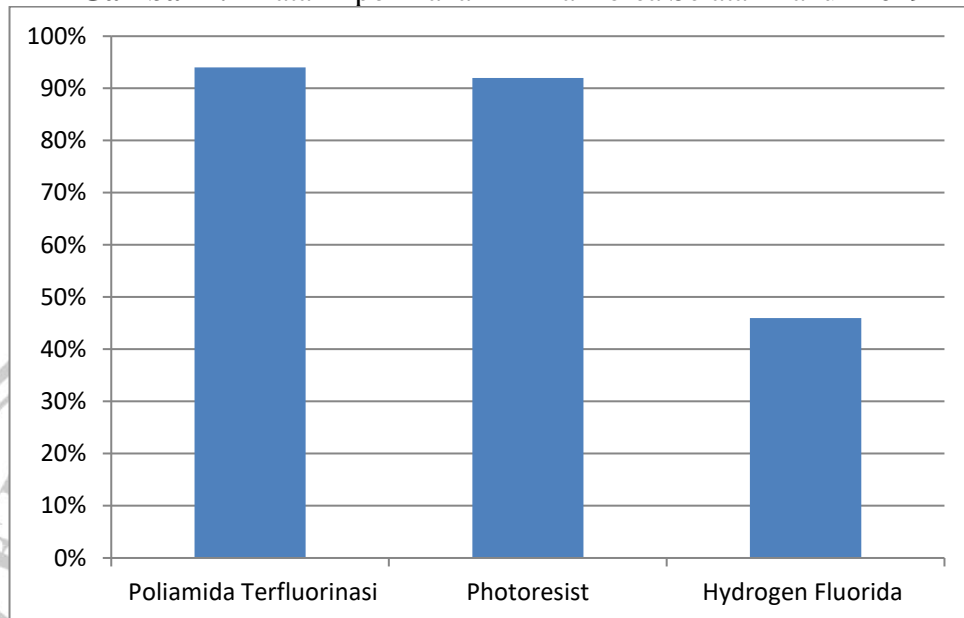
2.2 Masalah Kebijakan Pembatasan Ekspor Bahan Kimia Jepang Terhadap Korea Selatan Tahun 2019

Pada 1 Juli 2019 terjadi ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia terhadap Korea Selatan. Jepang melakukan pembatasan ekspor terhadap tiga bahan kimia yang digunakan dalam industri teknologi Korea Selatan, yaitu *poliamida terfluorinasi*, *photoresist*, dan *hidrogen fluorida*. Jepang merupakan salah satu produsen bahan kimia terbesar dan memiliki teknologi yang canggih dalam memproduksi bahan kimia. Pengaruh Jepang sebagai pengekspor bahan kimia kepada Korea Selatan sangat berpengaruh kepada industri teknologi Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan industri manufaktur yang berkembang pesat, seperti industri otomotif, elektronik dan kimia. Industri-industri tersebut tentunya membutuhkan suplai bahan kimia untuk proses produksinya. Korea Selatan

¹⁸ Lalitya, G. K.. *Analisis Sikap Yang Diambil Oleh Pemerintah Korea Selatan Pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait Dengan Isu Comfort Women*. VOL 6 NO 4 (2020), Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28875> (20/3/2024.19.30).

mengimpor bahan kimia dari Jepang 94% *poliamida terfluorinasi*, 92% *photoresist*, dan 46% *hydrogen fluorida* pada Januari hingga Mei tahun 2019.

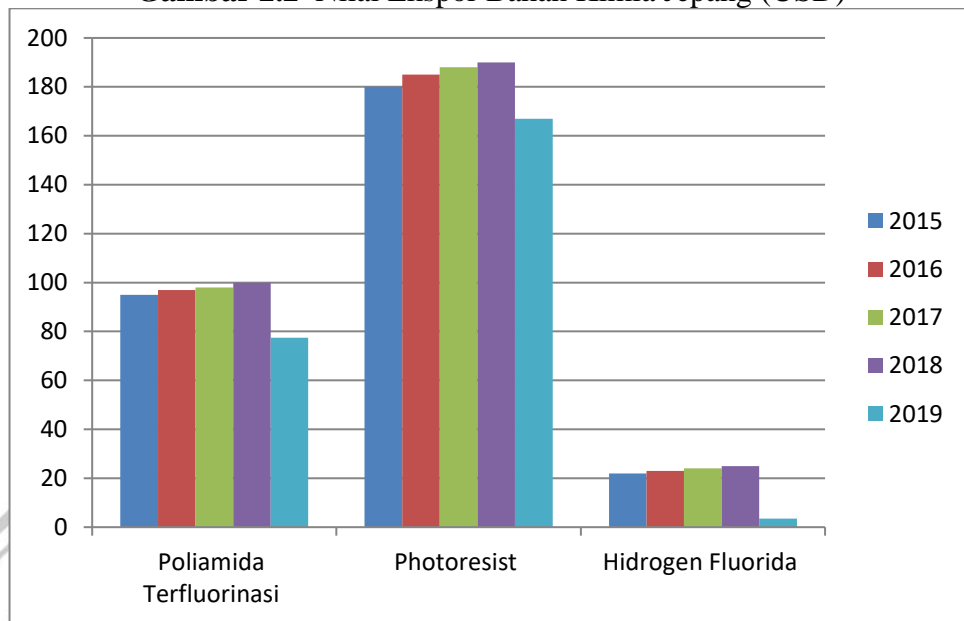
Gambar 2.1 Data Impor Bahan Kimia Korea Selatan Tahun 2019



Grafik Diolah Oleh Penulis (Sumber: Korea International Trade Association)

Jepang merupakan salah satu mitra dagang bagi Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan bahan kimianya. Peran Jepang sebagai pengeksportor bahan kimia terbesar ke Korea Selatan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian kedua negara. Setelah adanya kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang terhadap Korea Selatan, penurunan ekspor bahan kimia Jepang ke Korea Selatan pada tahun 2019 adalah 22,5% *poliamida terfluorinasi* dengan kerugian \$22 juta, 11,6% *photoresist* dengan kerugian \$22 juta, dan 85,9% *hidrogen fluorida* dengan kerugian \$21,5 juta.

Gambar 2.2 Nilai Ekspor Bahan Kimia Jepang (USD)



Grafik Diolah Oleh Penulis (Sumber: Semiconductor Equipment Association of Japan)

Kebijakan ekspor Jepang memiliki dampak pada kebutuhan pasokan bahan kimia bagi industri Korea Selatan. Pada saat Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor bahan kimia pada tahun 2019, hal tersebut menyebabkan kekhawatiran atas kelangsungan produksi industri teknologi Korea Selatan. Gangguan dalam pasokan bahan kimia menyebabkan penundaan dalam produksi, mengganggu stabilitas pasar, dan meningkatkan biaya produksi. Kebijakan pembatasan ekspor Jepang mengganggu hubungan ekonomi antara kedua negara dan memunculkan ketegangan politik.

Tujuan Jepang melakukan pembatasan ekspor bahan kimia terhadap Korea Selatan pada tahun 2019 karena beberapa faktor, seperti sejarah masa lalu dan keamanan nasional.¹⁹ Perselisihan sejarah antara Jepang dan Korea Selatan menjadi salah satu aspek yang paling mencolok dalam hubungan kedua negara.

¹⁹ Alexandra Sakaki, *Japan's New Arms Export Policies: Strategic Aspirations and Domestic Constraints*, VOL 74 (2020), Diakses dari: <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1781789>, (21/3/2024.15.30 WIB).

Sejak masa penjajahan Jepang di Korea dari tahun 1910 hingga 1945, hubungan ketegangan kedua negara bersumber dari sejarah masa lalu. Periode penjajahan Jepang di Korea ditandai dengan eksploitasi ekonomi, penindasan budaya, dan kebijakan represif yang meninggalkan bekas yang dalam bagi Korea Selatan. Korea Selatan sering kali menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Korea selama masa penjajahan Jepang.

Perselisihan sejarah menciptakan ketegangan politik yang dalam antara kedua negara dan sering kali menjadi hambatan dalam upaya membangun hubungan yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh Jepang sebagai upaya untuk menegaskan posisinya dalam perselisihan sejarah dengan Korea Selatan. Dengan mengambil langkah yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Korea Selatan, Jepang berusaha untuk menunjukkan kekuatan dan keputusan politiknya dalam menangani masalah tersebut. Jepang mengirimkan pesan kepada komunitas internasional bahwa mereka memperlakukan masalah sejarah dengan serius dan tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip sejarah demi kepentingan ekonomi semata. Selain itu, menggunakan faktor sejarah sebagai alasan pembatasan ekspor bahan kimia membantu Jepang memperkuat identitas nasionalnya dan memobilisasi dukungan domestik.

Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia dipahami sebagai bagian dari upaya Jepang untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasionalnya. Meskipun alasan resminya adalah keamanan nasional, langkah tersebut bisa menjadi strategi untuk membatasi pertumbuhan industri Korea Selatan yang menjadi pesaing dalam pasar global. Dengan membatasi akses Korea Selatan

terhadap bahan kimia, Jepang dapat menghambat kemajuan industri Korea Selatan dalam sektor-sektor yang bergantung pada bahan kimia tersebut.

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua kekuatan ekonomi utama di Asia yang bersaing dalam berbagai sektor industri. Kedua negara telah mengembangkan industri yang kuat dalam bidang teknologi, elektronik, otomotif, dan kimia. Jepang dan Korea Selatan berupaya untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia oleh Jepang dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Industri kimia merupakan salah satu sektor penting di Jepang. Pembatasan ekspor bahan kimia dianggap sebagai upaya untuk melindungi industri kimia Jepang dari persaingan asing yang semakin ketat. Dengan membatasi akses terhadap Korea Selatan, Jepang berharap untuk menjaga keunggulan kompetitifnya dalam produksi bahan kimia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keputusan Jepang mengambil keputusan pembatasan ekspor bahan kimia terhadap Korea Selatan sangat penting bagi keamanan nasionalnya. Ketegangan regional merupakan salah satu faktor dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang. Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia dianggap sebagai bagian dari strategi Jepang untuk menjaga keamanan di kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur menjadi pusat ketegangan geopolitik yang kompleks, terdapat persaingan kepentingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Korea

Utara, dan Jepang²⁰. Dalam hal ini, Jepang memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas regional dan mengelola risiko keamanan yang muncul dari dinamika politik dan militer di sekitarnya.

Salah satu sumber ketegangan utama di kawasan Asia Timur adalah program senjata nuklir dari Korea Utara. Ancaman yang dihadapi oleh Jepang dari program senjata nuklir Korea Utara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan keamanan Jepang. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Jepang mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi keamanan nasionalnya. Pembatasan ekspor bahan kimia menjadi salah satu cara untuk membatasi potensi pengembangan senjata kimia, sehingga mendukung upaya internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut²¹. Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia pada tahun 2019 dipicu oleh alasan Jepang yang menyatakan bahwa Korea Selatan telah menggunakan bahan kimia untuk kegiatan militer dan adanya ekspor ilegal. Bahan yang dimaksud, yaitu *hidrogen fluorida*, bahan tersebut dapat digunakan dalam senjata kimia²². Tindakan tersebut dilihat sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran keamanan nasional maupun internasional.

Jepang mengumumkan bahwa Korea Selatan akan dihapus dari daftar negara yang dianggap sebagai mitra dagang. Kebijakan penghapusan oleh Jepang terhadap Korea Selatan pada tahun 2019 merupakan salah satu langkah yang

²⁰ Nugroho, "History and Japanese South Korea Trade Wars", VOL 2 NO 1 (2019), Diakses dari: <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jrllc/article/view/3353> (20/3/2024.15.00 WIB).

²¹ Nopitri Uli Anastasia, Strategi Nuclear Deterrence Korea Utara Terkait Perkembangan Militer Di Kawasan Asia Timur Pada Tahun 2018- 2020, *Journal Internasional*, (2022), Diakses dari: <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/> (23/3/2024.21.30 WIB).

²² Rodhatul Aisy, 2019, *Peran Korea Selatan Sebagai Middle Power Dalam Krisis Hubungan Amerika Serikat-Korea Utara Tahun 2017-2018*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Hal.5-6.

memiliki dampak signifikan dalam konflik perdagangan antara kedua negara. Penghapusan tersebut mencerminkan penurunan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang mencapai puncaknya dalam ketegangan politik dan ekonomi. Tindakan Jepang tersebut menghilangkan beberapa keuntungan yang sebelumnya dinikmati oleh Korea Selatan dalam perdagangan dengan Jepang, seperti akses yang lebih cepat atau prosedur yang lebih ringan dalam proses ekspor dan impor. Kebijakan penghapusan tersebut memperumit proses ekspor Jepang ke Korea Selatan dan menimbulkan ketegangan tambahan antara kedua negara. Jepang menganggap bahwa Korea Selatan tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan status preferensial karena alasan keamanan nasional atau ketidaksepakatan dalam isu-isu politik tertentu. Selain itu, kebijakan ini dilihat sebagai upaya untuk memberikan tekanan politik atau ekonomi pada Korea Selatan sebagai tanggapan atas tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan yang dianggap tidak diinginkan oleh Jepang.

Masalah kebijakan tentang penerapan persyaratan lisensi ekspor yang diterapkan oleh Jepang terhadap Korea Selatan pada tahun 2019 merupakan yang paling terasa dalam konflik perdagangan antara kedua negara. Kebijakan ini memperkuat kontrol atas ekspor bahan kimia yang dianggap vital dalam industri teknologi. Persyaratan lisensi ekspor mengacu pada langkah yang diterapkan oleh pemerintah Jepang untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin mengekspor bahan kimia tertentu ke Korea Selatan untuk mendapatkan lisensi ekspor tambahan. Produsen di Jepang harus mengajukan permohonan khusus dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum mereka dapat

mengekspor bahan kimia tersebut ke Korea Selatan²³. Kebijakan pengenaan persyaratan lisensi ekspor Jepang terhadap Korea Selatan menggunakan kebijakan pengaturan dan pengendalian ekspor sebagai alat untuk memperkuat kekuatan industri Jepang. Jepang mengatur kewajiban pengelolaan ekspor seperti pengelolaan lokasi ekspor, pengelolaan dokumen, dan pengelolaan pengiriman. Penetapan persyaratan lisensi ekspor merupakan bentuk kontrol yang lebih ketat dari pemerintah Jepang atas perdagangan bahan kimia tertentu yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi akses Korea Selatan terhadap pasokan bahan kimia yang diperlukan dalam produksi teknologi.

Kebijakan penyelidikan terhadap perusahaan Korea Selatan yang diterapkan oleh Jepang sebagai bagian dari konflik perdagangan antara kedua negara pada tahun 2019 mencerminkan eskalasi yang lebih lanjut dari ketegangan politik dan ekonomi yang ada. Penyelidikan semacam itu merupakan salah satu untuk meningkatkan kontrol dan memantau kegiatan perdagangan yang dianggap berisiko dari Korea Selatan. Penyelidikan terhadap perusahaan Korea Selatan mengacu pada langkah yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk menyelidiki dan mengevaluasi aktivitas perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terlibat dalam perdagangan bahan kimia atau teknologi tertentu yang dianggap sensitif atau berpotensi berdampak pada keamanan nasional Jepang.

Masalah pembatasan ekspor bahan kimia Jepang terhadap Korea Selatan pada tahun 2019 mempengaruhi daya saing ekspor dan impor, sehingga

²³ Barbe, Andre, Dan Kim, Dan David Riker. *Trade and Labor in the U.S Semiconductor Industry*. *Journal of International Commerce and Economics*. United States International Trade Commission (2018), Diakses dari: https://www.usitc.gov/publications/332/journals/barbe_kim_and_riker_-_trade_and_labor_in_the_us_semiconductor_industry_.pdf (23/3/2024.23.00).

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua negara dan kinerja dari industri teknologi Korea Selatan. Adanya kebijakan tersebut mempengaruhi harga bahan kimia dan mempengaruhi inflasi di kedua negara, karena perubahan hubungan perdagangan dapat mempengaruhi keseimbangan surplus atau kekurangan devisa negara bagi Jepang dan Korea Selatan. Fluktuasi dalam hubungan dagang ini menyoroti perlunya diplomasi yang efektif dan dialog yang konstruktif antara Jepang dan Korea Selatan untuk mengatasi perselisihan mereka.

Secara keseluruhan, masalah kebijakan yang diterapkan oleh Jepang terhadap Korea Selatan pada tahun 2019 mencerminkan dinamika yang rumit dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan ketegangan politik dan ekonomi yang sedang berlangsung, tetapi menunjukkan potensi dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi kedua negara untuk mencari solusi dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka demi kepentingan bersama dan stabilitas regional yang berkelanjutan.